



**DISKRIMINASI TERHADAP KELOMPOK MINORITAS DI INDONESIA
DAN URGENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero
untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat
Program Studi Ilmu Teologi - Filsafat
Agama Katolik**

Oleh


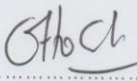
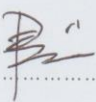
ARSENIUS NEGA

NPM: 17. 75. 6058

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT KATOLIK LEDALERO

2021

HALAMAN PENERIMAAN JUDUL

1. Nama : Arsenius Nega
2. NPM : 17.75.6058
3. Judul : Diskriminasi Terhadap Kelompok Minoritas di Indonesia dan Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan
4. Pembimbing :
 1. Dr. Yosef Keladu : 
(Penanggung Jawab)
 2. Dr. Otto Gusti Ndegong Madung : 
 3. Dr. Felix Baghi : 
5. Tanggal Diterima : 13 Juni 2020

6. Mengesahkan:

Wakil Ketua I


Dr. Yosef Keladu

7. Mengetahui:

Ketua STFK Ledalero


Dr. Otto Gusti Ndegong Madung



Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Skripsi

Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero

dan Diterima untuk Memenuhi Sebagian

dari Syarat-syarat guna Memperoleh

Gelar Sarjana Filsafat

Program Studi Ilmu Teologi-Filsafat

Agama Katolik

Pada


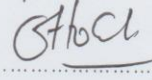
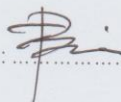
11 Mei 2021

Mengesahkan

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT KATOLIK LEDALERO

 KETUA,
SEKOLAH TINGGI
FILSAFAT KATOLIK
LEDALERO - MAUMERE - PONOROGO
Dr. Otto Gusti Ndegong Madung

DEWAN PENGUJI:

1. Dr. Yosef Keladu : 
2. Dr. Otto Gusti Ndegong Madung : 
3. Dr. Felix Baghi : 

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arsenius Nega

NPM : 17.75.6058

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul: **DISKRIMINASI TERHADAP KELOMPOK MINORITAS DI INDONESIA DAN URGENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan plagiat dari karya ilmiah yang ditulis orang lain atau lembaga lain. Semua karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang dirujuk dalam skripsi ini telah disebutkan sumber kutipannya serta dicantumkan pada catatan kaki dan daftar pustaka.

Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan atau penyimpangan, berupa plagiasi atau penjiplakan dan sejenisnya di dalam karya ilmiah ini, saya bersedia menerima sanksi akademis, yakni pencabutan skripsi serta gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Ledalero, 11 Mei 2021

Yang menyatakan

Arsenius Nega

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arsenius Nega

NPM : 17. 75. 6058

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalti-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul: **Diskriminasi terhadap Kelompok Minoritas di Indonesia dan Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan.** Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Ledalero

Pada tanggal: 11 Mei 2021

Yang menyatakan

Arsenius Nega

KATA PENGANTAR

Kita tentu bangga bahwa sistem demokrasi di Indonesia memberi banyak suntikan positif bagi kehidupan bersama. Setiap warga negara memiliki hak untuk mengekspresikan diri di ruang publik, bebas berpendapat, ada pelanggaran kebebasan pers, dan adanya undang-undang tentang hak asasi manusia. Pada aras ini Indonesia dapat dilihat sebagai rumah bersama yang mendamaikan. Untuk seterusnya, demokrasi mesti tetap menjadi corong bagi kehidupan politik untuk memperkokoh keindonesiaan dan siap menghadapi percaturan politik global yang lebih luas.

Namun, tak dapat disangkal bahwa terdapat potret buram yang mewarnai perjalanan bangsa Indonesia hingga hari ini. Selain kasus korupsi yang merajalela, penegakan hukum yang amburadul dan perekonomian yang terseok-seok, persoalan krusial lain yang juga berbahaya yang masih santer terjadi ialah diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Kelompok minoritas di Indonesia, sebagaimana yang telah diuraikan penulis dalam karya ini, yang sering mengalami tindakan diskriminatif adalah kelompok ras tertentu, etnis, agama, penyandang disabilitas dan LGBT. Ada kelompok tertentu di Indonesia yang merasa diri paling dominan dan berpengaruh, yang memanfaatkan ruang kebebasan demokrasi untuk memproduksi kekerasan demi kekerasan. Di negara yang bernafaskan demokrasi, kaum minoritas justru tidak mendapat tempat untuk mengekspresikan diri. Hemat penulis, kondisi ini akan menghancurkan demokrasi di Indonesia dari dalam. Kewarganegaraan demokratis tidak terjadi apabila masih ada warga negara yang didiskriminasi atau hak-haknya tidak diperhatikan.

Demokrasi kita akan menjadi terpuruk apabila kita tidak menghargai hak-hak kaum minoritas yang juga memiliki harkat dan martabat yang sama sebagai manusia. Kini dan di sini, amat mendesak bagi kita untuk membangun demokrasi yang lebih bermartabat dengan menghargai kaum minoritas dengan memberi mereka ruang yang sama untuk mewujudkan diri. Tulisan ini bermaksud menguraikan tentang realitas diskriminasi terhadap hak-hak kaum minoritas di Indonesia yang secara terang-terangan melabrak sistem demokrasi yang menjadi spirit kehidupan berbangsa dan bernegara. Hemat penulis, berhadapan dengan fakta memilukan ini, urgen untuk menghidupkan secara lebih baik dan sistematis

pendidikan kewarganegaraan bagi semua warga negara Indonesia tanpa kecuali. Di sini, pendidikan kewarganegaraan dijadikan sebagai kampanye strategis jangka panjang untuk mendidik warga negara yang tahu menghargai perbedaan, menjaga faktum pluralitas dan membendung tendensi diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Dalam karya ini, penulis mengadopsi konsep pendidikan kewarganegaraan menurut Will Kymlicka yang memuat dua hal penting, sivilitas dan kebernalaran publik. Oleh karena itu, untuk mendidik generasi masa depan Indonesia yang anti diskriminasi, maka sekolah-sekolah, LSM, media massa dan pelbagai forum prodemokrasi lainnya harus mampu mengembangkan dan mempraktikkan sivilitas dan kebernalaran publik. Akhirnya, demokrasi Indonesia dalam seluruh prosesnya harus bisa mengakomodasi hak-hak kaum minoritas. Sebab, penerimaan dan penghargaan terhadap kelompok minoritas adalah jembatan emas menuju demokrasi yang lebih bermartabat. Kemajuan politik demokrasi Indonesia juga ditentukan oleh warga negara yang paling lemah, kelompok minoritas.

Penulis sungguh menyadari bahwa tulisan ini merupakan buah dukungan, baik berupa moril maupun berupa gagasan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk menghaturkan rasa terima kasih kepada sejumlah pihak yang berjasa dalam menyelesaikan tulisan ini.

Pertama-tama penulis berterima kasih kepada Serikat Sabda Allah yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di STFK Ledalero. Penulis juga berterima kasih untuk Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero yang telah menjadi 'rumah belajar' paling nyaman bagi penulis untuk mengelaborasi ilmu-ilmu filsafat, teologi, humaniora dan lain-lain. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih berlimpah kepada dosen pembimbing Pater Dr. Yosef Keladu, SVD yang dengan setia dan sabar mendampingi penulis selama proses penulisan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada dosen penguji Pater Dr. Otto Gusti Madung, SVD yang telah bersedia membaca, memberi masukan dan catatan kritis selama ujian skripsi. Terima kasih juga untuk Pater Dr. Felix Baghi, SVD yang sudah menjadi pembimbing akademik penulis selama studi filsafat di Ledalero dan mendukung penulis melalui peranannya sebagai dewan penguji III.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada prefek unit St. Rafael Pater Paskalis Lina, SVD dan Pater Silvester Ule, SVD yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis untuk tekun belajar, giat berjuang dan menuntaskan tulisan tepat waktu. Terima kasih juga kepada teman-teman *fratres* di Wisma St. Rafael, yang dalam kebersamaan dan perjuangan, telah turut mendukung, menumbuhkan dan mengembangkan pelbagai bakat dan minat yang positif dalam diri penulis. Selain itu, saya bersyukur menjadi bagian dari angkatan Ledalero 80 dan berterima kasih kepada teman-teman angkatan yang sudah menjadi teman seperjalanan dan teman diskusi yang bisa saling memperkaya dan melengkapi. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua sahabat anggota Kelompok Menulis di Koran dan Diskusi Filsafat Ledalero (KMK-L), yang telah jadi rekan seperjalanan dalam usaha pengembangan bakat menulis dan berdiskursus.

Dalam rasa syukur yang dalam, saya mempersembahkan karya sederhana ini kepada semua orang yang telah mendukung dan mencintai saya dalam perjalanan hidup ini, terutama ayah tercinta Kristianus Dandung (Alm.) dan ibu tercinta Vinsensia Jemun. Mereka telah melahirkan dan mendidik saya menjadi anak yang baik dan memberi ruang bagi saya untuk belajar hal-hal baru dalam hidup. Selain untuk kedua orangtua, saya juga mempersembahkan karya sederhana ini kepada semua yang kukenang dalam doa dan cinta: enu Nyta Meo, enu Feby Umul, enu Anje Vini, enu Tresa Kapusin, adik Orgi Jontam (Alm.), segenap keluarga tercinta, sahabat dan kenalan semuanya. Mereka telah menjadi pendukung yang setia bagi panggilan dan perjalanan akademik saya hingga hari ini. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada segenap pembaca yang setia dan antusias membaca tulisan ini. Penulis sadar, tulisan ini mengandung terlalu banyak kekurangan untuk dapat disebut sebagai karya yang sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran pembaca sangat penulis harapkan.

Ledalero, 20 April 2021

Penulis

ABSTRAK

Arsenius Nega. 17.75.6058. *Diskriminasi Terhadap Kelompok Minoritas di Indonesia dan Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan*. Skripsi. Program Studi Filsafat, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2021.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk: *pertama*, mendeskripsikan dan menjelaskan hakikat diskriminasi dan minoritas. *Kedua*, menguraikan aneka bentuk diskriminasi terhadap kelompok minoritas di Indonesia. *Ketiga*, menjelaskan urgensi pendidikan kewarganegaraan sebagai bentuk kampanye strategis untuk mendidik warga negara yang mencintai perbedaan, menghargai pluralitas dan membendung tendensi diskriminatif terhadap hak-hak minoritas di Indonesia.

Metode yang digunakan penulis dalam proses penyelesaian tulisan ini adalah deskripsi kualitatif atas data-data yang diperoleh lewat studi kepustakaan. Penulis berusaha mencari, membaca dan menganalisis buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, berita dari koran dan internet yang berhubungan dengan tema yang digarap.

Berdasarkan hasil kajian, ditemukan bahwa di satu sisi, demokrasi yang dijalankan di Indonesia memberi banyak peran positif bagi kehidupan politik, seperti adanya kebebasan untuk berekspresi, berserikat, berpendapat, memilih dan mengamalkan nilai agama, dan memberi ruang bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan bersama. Namun, di sisi lain, masih terdapat aneka tindakan diskriminatif terhadap hak-hak kaum minoritas, seperti kelompok ras, etnis, agama, penyandang disabilitas dan LGBT. Akibatnya, kelompok minoritas hidup dalam ancaman, teror dan ketakutan.

Demokrasi yang bermartabat haruslah menghargai kaum minoritas dan memberi mereka ruang yang sama untuk mewujudkan diri. Tidak ada cara instan untuk menciptakan demokrasi seperti itu, tetapi harus ada sebuah kampanye strategis jangka panjang yang bertujuan untuk mendidik warga negara agar mencintai perbedaan, menghargai pluralitas dan membendung tendensi diskriminasi terhadap hak-hak minoritas di Indonesia. Penulis berpendapat bahwa salah satu model kampanye strategis tersebut adalah dengan menghidupkan (kembali) pendidikan kewarganegaraan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Will Kymlicka.

Bagi Will Kymlicka, pendidikan kewarganegaraan secara konkret menjadi wadah pembudayaan kebiasaan sivilitas dan kebernalaran publik. Sivilitas merujuk pada nilai-nilai yang penting diperjuangkan di dalam kehidupan publik, seperti nilai kesetaraan, kebebasan, kesederajatan, kemajemukan dan toleransi. Sedangkan kebernalaran publik merupakan bagian dari konsepsi politik yang hanya berlaku di dalam forum publik. Nalar publik adalah ciri utama dari warga negara yang demokratis. Pembudayaan sivilitas dan kebernalaran publik pertama-tama diajarkan dan dikembangkan di sekolah-sekolah, dan didukung pula oleh kehadiran media massa, LSM dan berbagai forum prodemokrasi lainnya. Upaya ini bertujuan untuk membentuk dan membiasakan warga negara Indonesia

yang sanggup menerima faktum keberagaman dan menghargai sesama dari kelompok lain, istimewa kelompok minoritas.

Akhirnya, penerimaan dan penghargaan terhadap hak-hak kaum minoritas adalah jembatan emas menuju demokrasi yang lebih bermartabat. Demokrasi bermartabat juga ditentukan oleh sikap akomodatif terhadap hak-hak warga negara yang paling lemah, kaum minoritas.

Kata-kata kunci: Diskriminasi, Hak-Hak minoritas, Pendidikan Kewarganegaraan, Sivilitas dan Kebernalaran Publik.

ABSTRACT

Arsenius Nega. 17.75.6058. *Discrimination Against Minority Groups in Indonesia and the Urgency of Citizenship Education*. Essay. Philosophy study program, The Institute of Catholic Philosophy Ledalero, 2021.

This essay aims to: first, describing and explaining the essence of discrimination and minority. Second, elaborating various forms of discrimination against minority groups in Indonesia. Third, explaining the urgency of citizenship education as a form of strategic campaign to educate citizens who love differences, respect plurality and stem discriminatory tendencies against minority rights in Indonesia.

The method used by the writer in the process of completing this paper is a qualitative description of the data obtained through literature study. The writer tries to find, read and analyze books, scientific journals, news from newspapers and the internet related to the theme being worked on.

Based on the results of the study, it was found that on the one hand, democracy that is carried out in Indonesia provides many positive roles for political life, such as the freedom to express, associate, argue, choose and practice religious values, and provide space for citizens to participate in life together. However, on the other hand, there are still various discriminatory actions against the rights of minorities, such as racial, ethnic, religion, persons with disabilities and LGBT groups. As a result, minority groups live in threats, terror and fear.

A dignified democracy must respect minorities and provide them with equal space to manifest themselves. There is no instant way to create democracy like that, but there must be a long-term strategic campaign that aims to educate citizens to love differences, respect plurality and stem the tendency of discrimination against minority rights in Indonesia. The writer argues that one of the strategic campaign models is to activate and practice citizenship education, as suggested by Will Kymlicka.

For Will Kymlicka, citizenship education has become a platform for cultivating the habit of civility and public reasoning. Civility refers to values that are important to be fought for in public life, such as the values of equality, freedom, plurality and tolerance. Meanwhile, public reasoning is part of political conception that only applies in public forums. Public reasoning is the main characteristic of democratic citizens. The cultivation of civility and public reasoning is first taught and developed in schools, and is also supported by the presence of the mass media, NGOs and various other pro-democracy forums. This effort aims to shape and accustom Indonesian citizens who are able to accept the fact of diversity and respect others from other groups, especially minority groups.

Finally, acceptance and respect for the rights of minorities is a golden bridge to a more dignified democracy. Dignified democracy is also determined by an accommodative attitude towards the rights of the weakest citizens, the minorities.

Keywords: Discrimination, Minority Rights, Citizenship Education, Civility and Public Reasoning.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENERIMAAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penulisan.....	12
1.4 Metode Penulisan	13
1.5 Sistematika Penulisan	13
BAB II HAKIKAT DISKRIMINASI DAN MINORITAS	14
2.1 Hakikat Diskriminasi dan Minoritas	14
2.1.1 Diskriminasi	14
2.1.1.1 Pengertian Diskriminasi	14
2.1.1.2 Faktor-Faktor Penyebab Diskriminasi	17
2.1.1.2.1 Model Sosiologis.....	18
2.1.1.2.2 Model Kosmopolitanisme	19
2.1.1.2.3 Model Ekonomi Politik	20
2.1.1.2.4 Model Nilai dan Sistem Demokrasi	21
2.1.1.3 Jenis-jenis Diskriminasi	22
2.1.1.4 Bentuk-bentuk Diskriminasi	23

2.1.2 Minoritas	25
2.1.2.1 Pengertian Minoritas	25
2.1.2.2 Karakteristik Kelompok Minoritas	31
2.1.2.3 Lima Kelompok Minoritas Menurut Komnas HAM dalam Konteks Indonesia	32
2.1.2.3.1 Kelompok Minoritas Ras	33
2.1.2.3.2 Kelompok Minoritas Etnis	35
2.1.2.3.3 Kelompok Minoritas Agama	39
2.1.2.3.4 Kelompok Minoritas Penyandang Disabilitas	42
2.1.2.3.5 Kelompok Minoritas Berdasarkan Orientasi Seksual	44

BAB III FAKTA DISKRIMINASI TERHADAP KELOMPOK MINORITAS

DI INDONESIA DAN URGENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	48
3.1 Fakta Diskriminasi Terhadap Minoritas di Indonesia	48
3.1.1 Diskriminasi Terhadap Minoritas Ras	50
3.1.2 Diskriminasi Terhadap Minoritas Etnis	52
3.1.3 Diskriminasi Terhadap Minoritas Agama	53
3.1.4 Diskriminasi Terhadap Minoritas Penyandang Disabilitas	56
3.1.5 Diskriminasi Terhadap Minoritas Berdasarkan Orientasi Seksual	58
3.2 Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan di Tengah Maraknya Diskriminasi Terhadap Kelompok Minoritas di Indonesia	61
3.2.1 Bangunan Konseptual Kewarganegaraan	61
3.2.2 Pendidikan Kewarganegaraan	68
3.2.2.1 Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah dan Tanggung Jawab Negara ...	69
3.2.2.2 Pendidikan Kewarganegaraan: Membudayakan Sivilitas dan Kebernalaran Publik	79
3.2.2.3 Pendidikan Kewarganegaraan: Memaklumi Perbedaan dan Menghargai Pluralitas	92

BAB IV PENUTUP	96
4.1 Kesimpulan	96
4.2 Usul dan Saran	101
4.2.1 Bagi Pemerintah.....	101
4.2.2 Bagi Lembaga Pendidikan Formal (Sekolah Dasar-Perguruan Tinggi)	101
4.2.3 Bagi Media, LSM, dan Forum Prodemokrasi	102
4.2.4 Bagi Para Generasi Penerus Bangsa	102
4.2.5 Bagi Masyarakat.....	103
DAFTAR PUSTAKA	104